



Mangrove: Collaboration and Conflict Between Companies and Communities

Nurul Chamidah*

Article Info

*Correspondence Author

(1) Department of Communication, Faculty of Social and Political Science, Universitas Muhammadiyah Cirebon.

How to Cite:

Chamidah, N. (2023). *Mangrove: Collaboration and Conflict Between Companies and Communities*. E-Proceeding Conference: Indonesia Social Responsibility Award, 1(1), 176-190

Article History

Submitted: 17 June 2023

Received: 18 June 2023

Accepted: 7 August 2023

Correspondence E-Mail:

nurul.chamidah@umc.ac.id

Abstract

Mangroves play an essential role in the defense of natural disasters from the sea, economic value benefits and protection of biodiversity. This study aims to explain the mangrove ecosystem environmental protection program implemented by the community and supported by the corporate social responsibility program of PT Telkom Indonesia in Ambulu Village, Losari District, Cirebon Regency. This study seeks to explain the perception of mangrove planting programs by mangrove activists and conflicts between companies and communities in mangrove management. This research uses an exploratory qualitative perspective with data collection in the form of collaborative participatory which places researchers as the main key in conducting research. Data collection was carried out by observation and interviews with mangrove forest mobilizers. This study outlines the environmental protection program and economic improvement of mangroves carried out by the people of Ambulu Village. The results showed that different perspectives on the implementation of the mangrove program in Ambulu occurred between the company and the Grow Up Institute community as program facilitators and the forest farmer group. Groups and facilitators focus more on the sustainability of mangroves adapted to ecosystems and climate-based planting, while companies tend to focus on achieving activities and program reporting that are limited to the annual working month/ calendar.

Keywords: CSR; Conflict; Community; Mangroves; Sustainable Development



Mangrove: Kolaborasi dan Konflik Antara Perusahaan dan Komunitas

Nurul Chamidah^{1*}

Info Artikel

⁽¹⁾ Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Surel Korespondensi:
nurul.chamidah@umc.ac.id

Abstrak

Mangrove berperan penting dalam pertahanan bencana alam dari laut, manfaat nilai ekonomi dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Penelitian ini bertujuan menjelaskan program penyelamatan lingkungan ekosistem mangrove yang dilaksanakan oleh Masyarakat dan didukung oleh program *corporate social responsibility* PT Telkom Indonesia di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini berupaya menjelaskan persepsi program penanam mangrove oleh penggiat mangrove serta konflik antara perusahaan dan masyarakat dalam pengelolaan mangrove. Penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif eksploratif dengan pengumpulan data berupa partisipatif kolaboratif yang menempatkan peneliti sebagai kunci utama dalam pelaksanaan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada aktor penggerak hutan mangrove. Penelitian ini menguraikan program penyelamatan lingkungan dan peningkatan ekonomi dari mangrove yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ambulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sudut pandang pelaksanaan program mangrove di Ambulu terjadi antara perusahaan dan komunitas Grow Up Institute sebagai fasilitator program dan Kelompok Tani Hutan. Kelompok dan fasilitator lebih menitikberatkan pada keberlangsungan mangrove disesuaikan dengan ekosistem dan penanaman berbasis iklim sementara perusahaan cenderung berfokus pada capaian kegiatan dan pelaporan program yang dibatasi pada bulan/kalender kerja tahunan.

Kata Kunci: CSR; Kelompok; Konflik; Mangrove; Pembangunan Berkelanjutan

Pendahuluan

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDG) beberapa di antaranya adalah perubahan iklim keterlibatan wanita, peningkatan ekonomi dan pengurangan kemiskinan menjadi dasar fondasi yang sesuai dengan programnya yang kita usung. Isu dunia terkait perubahan iklim membawa para petinggi dunia melakukan pertemuan di Glasgow, Skotlandia. Salah satu upaya yang sejalan adalah dengan penyelamatan pesisir pantai dengan pemulihan ekosistem mangrove. Mangrove adalah salah satu upaya dalam rangka penyelamatan lingkungan, benteng alam guna menahan abrasi, perlindungan lingkungan hidup bagi keanekaragaman hayati dan hewani serta di saat yang sama menjadi destinasi pariwisata yang menghasilkan nilai ekonomi (Trinanda, 2017).

Ekosistem wilayah pantai berkarakter unik dan khas karena merupakan pertemuan antara ekosistem daratan ekosistem lautan. Ekosistem wilayah itu memiliki arti strategis karena memiliki potensi kekayaan hayati baik dari segi biologi, ekonomi bahkan pariwisata. Salah satu potensi wilayah pantai adalah mangrove. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan mangrove terbesar dan memiliki kekayaan hayati yang paling banyak. Luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 75% dari total mangrove di Asia Tenggara. Atau sekitar 27% dari luas mangrove di dunia. Kekhasan ekosistem mangrove Indonesia adalah memiliki keragaman jenis yang tertinggi di dunia. Sebaran mangrove di Indonesia terutama di wilayah pesisir Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Luas penyebaran mangrove terus mengalami penurunan 4,25 juta hektar pada tahun 1982 menjadi sekitar 3,24 juta hektar pada tahun 1987, dan tersisa seluas 2,50 juta hektar pada tahun 1993. Kecenderungan penurunan tersebut mengidentifikasi bahwa terjadi degradasi hutan mangrove yang cukup nyata, yaitu sekitar 200 ribu hektar/tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta dari masyarakat dan pemerintah untuk melestarikan mangrove untuk mengembalikan ekosistem mangrove sebagai benteng alam. Melalui instruksi dari kementerian BUMN yang juga senada dengan program *corporate social responsibility* maka perusahaan nasional, internasional melakukan program penanaman mangrove.

Wilayah pesisir merupakan lingkungan yang kaya akan sumber daya hayati maupun non-hayati. Intensitas pemanfaatan wilayah ini sangat tinggi di antaranya sebagai pemukiman, budidaya perikanan, pertanian dan pariwisata. Tingginya intensitas pemanfaatan dan kurangnya kesadaran dalam pelestarian akan mengakibatkan kerentanan terhadap kondisi fisik maupun sosial. Wilayah pesisir beserta sumber daya alamnya itu tentu menjadi arti penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Nilai ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu secara sosial ekonomi, dan secara biofisik. Secara sosial ekonomi, wilayah pesisir dan laut menjadi titik tumpu bagi 120 juta penduduk Indonesia yang hidup di wilayah pesisir. Secara biofisik, dengan garis pantai lebih dari 80.000 kilometer menjadikan Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir laut di Indonesia yang menjadikan wilayah pesisir dan laut memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Hal ini menjadi pertanyaan umum tentang rendahnya taraf hidup masyarakat nelayan. Dengan kondisi tersebut, tidak heran apabila masyarakat memiliki anggapan bahwa perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir oleh instansi pemerintah berkaitan untuk memenuhi tujuan tertentu tanpa memikirkan dampak ke depannya. Sumber daya mangrove memiliki potensi pemanfaatan yang cukup tinggi (Aguw et al., 2020)

Potensi serta permasalahan terkait pelestarian lingkungan membutuhkan peran serta dari pemerintah, masyarakat dan swasta. Peran swasta dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan swasta tertuang dalam Permen BUMN Nomor PER-

05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sebagai contoh delapan BUMN melakukan penanaman guna mendukung kelestarian mangrove di Muara Angke Bekasi. Peran serta perusahaan untuk menyalurkan dana CSR dalam pelestarian hutan mangrove juga perlu analisis bagaimana kolaborasi antara masyarakat sekitar pesisir dan juga bagaimana konflik yang terjadi antara saat pelaksanaan program tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Ambulu, Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Penelitian menggunakan pendekatan eksploratif kualitatif yakni berusaha mengeksplorasi dan memahami individu atau kelompok dalam menanggapi permasalahan sosial (Creswell, 2014). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipatif yang berarti peneliti terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan serta turut serta pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat. Peneliti berada pada posisi fasilitator antara masyarakat yang diwakili oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Jaya Ambulu dan Kepala Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dan PT Telkom Indonesia divisi *Community Development Center* selaku perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wawancara dilakukan secara terselubung selama proses observasi yang artinya narasumber tidak menyadari sedang diwawancara sehingga data yang diperoleh dapat lebih natural. Penelitian ini lebih banyak menganalisa perspektif masyarakat atas kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan oleh pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, serta PT Telkom Indonesia.

Pembahasan

Pada pembahasan diuraikan beberapa sub bagian yang terdiri atas profil mangrove Desa Ambulu; Konsep *Silvofishery* dalam penanaman mangrove; Program pemberdayaan masyarakat; Konflik perusahaan dan kelompok penggerak; serta, kendala dan hambatan dalam program yang berkaitan dengan mangrove.

A. Profil Mangrove Desa Ambulu

Desa Ambulu merupakan tempat ujung utara Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Desa Ambulu merupakan desa yang berada di lingkungan Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Luas wilayah menurut penggunaannya 536.110 ha/m². dan dengan jumlah penduduk desa hampir 70% berpenghasilan dari hasil perikanan. Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Ambulu bisa digunakan sebagai lahan tempat tinggal atau perumahan hanya sedikit saja yang digunakan untuk perkebunan, namun mayoritas daerahnya merupakan area tambak. Desa Ambulu, Kecamatan Losari memiliki luas area pemukiman 54.045 ha/m². Salah satu unggulan dari Desa Ambulu adalah adanya Badan Usaha Milik desa (BUMDES) berupa pemanfaatan sungai Caplok Barong dan mangrove sebagai kawasan wisata.

Kondisi mangrove di Desa Ambulu Kecamatan Losari merupakan kawasan hutan rehabilitasi mangrove, yang cukup potensial di Kabupaten Cirebon. Hal ini dapat dilihat dari dibukanya wisata hutan mangrove Caplok Barong di Ambulu Losari, selain sajian pemandangan hijau dari hutan mangrove juga dengan tawaran wisata lainnya seperti wisata mancing, wisata naik perahu, dan adanya spot foto yang bagus sehingga dapat menarik minat wisatawan. Amenitas objek wisata ini terdiri atas fasilitas ruang makan yang bisa digunakan untuk makan bersama, istirahat, piknik keluarga maupun acara arisan dengan tema luar ruang. fasilitas lainnya adalah terdapatnya warung makan yang menjual aneka olahan seafood dan cemilan; zona parkir, toilet umum dan mushola.

Upaya pelestarian hutan mangrove ini bukan sekedar wacana tetapi sudah dilakukan oleh kelompok tani hutan mangrove dengan membuat desa ekowisata mangrove semenjak 2019. Kawasan wisata hutan mangrove Caplok Barong terletak di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Letaknya yang strategis didukung dengan potensi sumber daya pesisir dan laut yang dimiliki oleh Desa Ambulu. Aksesibilitas hutan mangrove adalah 3 kilometer dari Jalan Utama Nasional Pantura sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh pengunjung baik dari wilayah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes.

Luas objek wisata ini adalah kurang ± 1 Ha dengan luas hutan mangrove 10 Ha. Mangrove di daerah ini (Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon) tumbuh secara alami, ada yang ditanam secara sukarela oleh masyarakat ada juga yang ditanam oleh beberapa kelompok. Sejak tahun 2019 dirintis pengembangan hutan mangrove sebagai lokasi wisata dengan penanaman serta memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar akan pentingnya hutan mangrove/tanaman mangrove.

Kawasan wisata hutan mangrove ini dibangun oleh masyarakat, pemuda Desa Ambulu, serta kelompok-kelompok terkait dengan didukung penuh oleh pemerintahan Desa Ambulu. Pengembangan dan pembangunan wisata dimulai pada bulan Februari 2019 dengan menggunakan anggaran dana desa untuk membangun *step track* bambu sepanjang 230 meter. Tahap kedua dilanjutkan pada bulan Maret dengan penambahan pembangunan (Spot menarik, kantin, musala, toilet, gapura, loket masuk, dan tempat bersantai bagi pengunjung sebanyak 20 unit).

Semenjak diresmikan oleh Kepala Desa Ambulu Kecamatan Losari kabupaten Cirebon pada tanggal 05 Mei 2019, wisata mangrove Caplok Barong telah menerima ± 26.400 pengunjung dengan pendapatan \pm Rp. 123.000.000, selain itu telah dilakukan konservasi lingkungan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintahan desa dan pencinta lingkungan serta pemerintah desa setempat. Wisata hutan mangrove Caplok Barong dikelola oleh salah satu unit usaha BUMDES Ambulu Maju dibantu oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) dan kelompok sadar wisata (pokdarwis).

B. Penanaman Mangrove Berbasis Konsep *Silvofishery*

Lingkungan merupakan kondisi fisik yang mencakup sumber daya alam. Lingkungan juga mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, atau sering disebut lingkungan hidup. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor baik faktor alami ataupun karena tangan-tangan jahil manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut.

Salah satu kerusakan lingkungan yang perlu dibenahi dengan serius yaitu pesisir pantai, karena pesisir merupakan salah satu lingkungan perairan yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat. Wilayah pesisir yang meliputi daratan dan perairan pesisir sangat penting artinya bagi bangsa dan ekonomi Indonesia. Secara garis besar gejala kerusakan lingkungan yang mengancam kelestarian sumber daya pesisir dan lautan di Indonesia, yaitu : pencemaran, degradasi fisik habitat, over eksploitasi sumber daya alam, abrasi pantai, konservasi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya dan bencana alam.

Penebalan tanaman mangrove ini merupakan program kerja sama antar seluruh pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, akademisi, swasta dan komunitas). Adapun kegiatan

yang dilakukan, yaitu observasi, penggalian informasi, aksi, dan evaluasi program (pemeliharaan). Tipologi kawasan pesisir Desa Ambulu adalah tanah berlumpur dan digunakan sebagai empang ikan udang dan bandeng. Kondisi ini menjadi keuntungan nilai ekonomi masyarakat berupa hasil perikanan. Oleh karena itu, untuk revitalisasi mangrove dapat menggunakan sistem *silvofishery* mangrove.

Silvofishery adalah sistem tambak berteknologi tradisional yang menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove, yang diikuti konsep pengenalan sistem pengelolaan dengan meminimalkan input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan (Macintosh et al., 2002 dalam Shilman, 2012). Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah melakukan penghijauan pesisir laut dengan menanam mangrove di sungai dan sekeliling tambak di sepanjang pesisir laut Desa Ambulu.

C. Penanaman, Perawatan, dan Monitoring Mangrove PT Telkom Indonesia

Desa Ambulu merupakan wilayah yang bersifat akresi (penambahan daratan) dengan tanah yang berlumpur. Wilayah ini sangat pas untuk mangrove jenis *Rhizophora* (bakau) dan *Avicennia* (api-api). Sebagian besar lahan pesisir Desa Ambulu digunakan sebagai tambak udang dan ikan bandeng. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa konsep *silvofishery* menggabungkan konsep tambak dan mangrove.

Lokasi penanaman dilakukan di beberapa sungai yaitu sungai Caplok Barong, Sungai Kalibetik, Sungai Kalianyar dan Sungai Kali Belo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keamanan penanaman dan pertumbuhan mangrove dari ombak laut. Beberapa lokasi yang digunakan ditandai dengan istilah sektor A, B, dan C. hal ini untuk memudahkan proses pemantauan mangrove. Mangrove sendiri menjadi benteng alam dari abrasi dan penangkap sedimen lumpur dari laut. Namun jika tanpa bantuan berupa APO (alat penghalau Ombak) yang berasal dari bambu atau geotop dari beton. Jika tanpa bantuan alat tersebut maka bibit yang ditanam akan hilang tersapu ombak laut. Oleh karena itu, tahapan penanaman dilakukan disisi sungai terlebih dahulu.

Penanaman pada bagian hulu sungai dilakukan oleh tim kelompok tani hutan mangrove. Sedangkan wilayah yang terdekat seperti empang masyarakat yang dekat dengan objek wisata digunakan untuk sarana edukasi bagi para siswa/mahasiswa atau tamu yang ingin menanam mangrove. Di samping itu, lokasi penanaman mangrove tahap selanjutnya adalah di bantaran antara tambak. Kondisi ini memerlukan tahapan penyadaran masyarakat bersama untuk mau bersama menanam mangrove di lahan empang milik mereka.



Gambar 1. Desain lahan penanaman mangrove berbasis konsep silvofishery
Sumber: Analisis peneliti



Gambar 2. Seremoni penanaman mangrove PT Telkom Indonesia Tahun 2022
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Tahun 2021 penanaman mangrove di Desa Ambulu dilakukan secara bertahap selama 3 kali yaitu bulan September, Oktober dan Desember. Penanaman melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa Ambulu dan para *stakeholder* lain seperti pelajar, mahasiswa, santri pondok pesantren, serta TNI-Polri. Jumlah penanaman pada tahun 2021 sebanyak 20.000 bibit dengan sistem tambal sulam dan perawatan lainnya.

Pada bulan Juni tahun 2022, Desa Ambulu menjadi desa binaan PT Telkom Indonesia. Melalui serangkaian Hari Ulang Tahun atau *Anniversary* ke-57 PT Telkom Indonesia memberikan bantuan bibit mangrove sebanyak 57.000 bibit. Jumlah ini menggenapi penanaman mangrove sebelumnya pada tahun 2021 sebanyak 20.000 bibit dan tahun 2022 sebanyak 37.000 bibit sehingga genap menjadi 57.000 yang melambangkan angka 57. Adapun penanaman dilakukan secara bertahap hingga mencapai total penanaman 37.000 mulai dari bulan Juni dan Juli sebanyak 16.000 bibit. Masa penanaman dihentikan dulu pada musim kemarau guna efisiensi bibit mangrove agar tidak mati karena panas matahari. Bulan Oktober-November memasuki musim hujan dilakukan kembali proses penanaman mangrove sebanyak 21.000 bibit yang tersebar di berbagai lokasi seperti Sungai Caplok Barong, sungai Kali Betik, Sungai Kali Anyar dan Sungai Kali Belo.

Penanaman mangrove dilakukan bersama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) *Mangrove Maju Jaya Ambulu*. Kelompok ini beranggotakan 10 orang dengan ketua bernama Rifki Anwary. Penanaman dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan waktu tanam pada hari libur kerja. Hal ini dilakukan agar penanaman mangrove tidak mengganggu jam kerja para anggota KTH yang bekerja sebagai mahasiswa, buruh bangunan, pekerja kantoran, dan nelayan.

Pelaksana penanam mangrove juga melibatkan para pemuda dan para nelayan yang turut serta menanam mangrove. Selain itu, kami juga mengajak serta masyarakat dan para mahasiswa yang turut serta membantu penanaman mangrove. Pelaksanaan program juga mengajak serta para siswa SDN 3 Ambulu untuk bersama menanam mangrove. Hal ini bertujuan guna mengedukasi sedari dini tentang mangrove dan manfaatnya terhadap lingkungan.

Pada tahun 24 Oktober 2021, dilaksanakan penanaman mangrove dengan tema Sinergi Santri dan TNI-POLRI dalam rangka memperingati hari santri tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut hadir perwakilan PT Telkom Indonesia yang diwakili oleh Bapak Sanjaya. Penanaman dilakukan secara bersama-sama melibatkan TNI AD, TNI AL, Brimob, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Pondok Pesantren dari Kabupaten Cirebon, Barisan Ansor, pelajar dari SMAN 1 Losari, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Komunitas Lintang Nuswantara, Universitas Pertahanan, dan masyarakat Desa Ambulu.



Gambar 3. Pelibatan pelajar SDN 3 Ambulu sebagai bentuk pengenalan lingkungan mangrove sejak dini.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Kebutuhan sumber bibit *mangrove* selama program penanaman *mangrove* diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian diperoleh empat sumber utama bibit yakni:

1. Bibit Mangrove (*propagule*)

Desa Ambulu masih memiliki hutan mangrove yang berusia ratusan tahun. Hal ini terbukti dengan adanya hutan mangrove yang berada di sungai Belo. Hutan mangrove Sungai belo dipercayai angker sehingga masyarakat sangat tabu untuk melewati lokasi sungai tersebut. Dalam istilah biologi kondisi masyarakat yang mengaitkan sistem kepercayaan klenik atau tabu/larangan sejatinya merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap alam dari ulah manusia yang tamak atas pembalakkan kayu hutan dan pembukaan lahan (Anggraini, 2018)

Hutan mangrove yang terjaga tersebut menjadi sumber bibit mangrove berupa *propagule* yang siap tanam. Para anggota kelompok tani hutan mangrove ini mencari bibit mangrove dengan perahu kecil guna diambil dan ditanam di lokasi penanaman. Keunggulan menanam mangrove melalui *propagule* adalah pertama, Proses mobilitas bibit menuju area penanaman mangrove hingga muara laut melewati medan yang cukup berat. Kondisi ini menjadikan kesulitan saat masyarakat lewat untuk membawa bibit mangrove. Terlebih jika kondisi hujan dan becek. Jika membawa bibit yang sudah berusia 3 bulan dengan 3-5 helai daun, maka proses pengangkutan akan merusak bibit dan jumlah yang dibawa menjadi terbatas. Dengan *propagule* proses pengangkutan jadi lebih mudah. Kedua, *propagule* yang langsung disemai di tepi sungai mampu beradaptasi dengan kondisi air dan tanah sehingga daya tahan bibit bisa lebih kuat.

2. Bibit Mangrove Persemaian Kelompok Tani Hutan (KTH)

Bibit mangrove berasal dari persemaian Kelompok Tani Hutan Mangrove (KTH) Maju Jaya Ambulu. Bibit dari media persemaian ini berjumlah 16.000 bibit. Dan penanaman dilakukan pada bulan Juli dan Agustus.

3. Bibit Mangrove Milik Petani Mangrove Desa Ambulu

Pengambilan bibit mangrove usia 3 bulan tidak seluruhnya mengambil dari persemaian kelompok tetapi juga dari petani mangrove di luar kelompok di Desa Ambulu. Hal ini berupaya guna memberikan rasa berbagi rezeki kepada masyarakat Desa Ambulu serta sebagai upaya menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam

menjaga alam dan mengenal PT Telkom Indonesia sebagai lembaga yang membina Desa Ambulu.

4. Bibit Mangrove Dari Luar Desa Ambulu.

Bibit Mangrove juga berasal dari kelompok Tani Hutan Mangrove lainnya seperti dari Kecamatan Suranenggala, Kecamatan Gunung Jati, dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Hal ini disebabkan bibit yang dimiliki oleh kelompok dan petani mangrove Desa Ambulu masih belum cukup umur untuk dipindahtanamkan ke lokasi yang disesuaikan. Jika dipaksakan maka akan berimbas pada daya tahan hidup bibit yang rendah.

Masyarakat berkomitmen dalam pelestarian ekosistem mangrove dengan tidak hanya sekedar menanam tetapi juga perawatan. Perawatan mangrove yang dimaksud adalah dengan melakukan penggantian bibit yang mati dengan bibit yang baru atau dengan istilah lain adalah penyulaman. Banyak faktor yang menjadikan bibit mati seperti kondisi bibit semenjak awal tidak bagus, panas terik matahari, gagal penyesuaian di media tanam baru, tergerus arus sungai, bahkan bibit dimakan oleh hewan ternak seperti kambing, domba, dan kerbau. Pihak masyarakat berkomitmen untuk melakukan perawatan pasca tanam dengan memonitoring pertumbuhan mangrove berupa pengecekan dan pendokumentasian lokasi.



Gambar 4. Dokumentasi sebelum dan sesudah penanaman mangrove
Sumber: Dokumentasi peneliti



**Gambar 5. Dokumentasi *monitoring* penanaman mangrove dan pelaporan secara berkala kepada Perusahaan.
Sumber: Dokumentasi peneliti**



**Gambar 6. Dokumentasi program mangrove sebelum penanaman dan usia mangrove setelah dua tahun
Sumber: Dokumentasi peneliti**

D. Konflik antara perusahaan, komunitas dan Kelompok.

Terdapat konflik kepentingan antara perusahaan dengan aktor penggerak mangrove. Hal ini terjadinya perbedaan pandangan. Penanaman mangrove yang bersifat seremonial dilakukan guna memberikan bukti perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan pada kelestarian lingkungan hidup. Pemberian bibit sebanyak 57.000 bibit memerlukan waktu yang tidak sebentar guna penanaman yang tepat dalam sisi perhitungan bibit. Dalam hal ini pelaksana penanaman mangrove dilakukan oleh unsur yaitu Perusahaan yakni PT Telkom Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat Grow Up Institute dan para aktor penggerak masyarakat yaitu kelompok Tani Hutan Mangrove Maju Jaya Ambulu.

Grow Up Institute yang menjadi fasilitator dari PT Telkom Indonesia yang mengajukan program revitalisasi pesisir utara Cirebon melalui rehabilitasi ekosistem mangrove selama

tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada pelaksanaannya ide gagasan penanaman dan pengembangan ekosistem laut dilakukan bersama dengan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kolaboratif aktif yang menjadikan masyarakat sebagai aktor utama program. Peran Grow Up Institute selain sebagai pemberi gagasan program yang disesuaikan dengan program besar perusahaan. Komitmen GUI berupaya memberikan laporan program kepada perusahaan serta penyusunan program yang mengedepankan pada peran aktif masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan nilai tambah sektor ekonomi dari program mangrove di Desa Ambulu ini.

Perbedaan persepsi terjadi antara perusahaan dan komunitas. Seringkali perusahaan meminta laporan sesegera mungkin pasca penanaman mangrove secara seremonial sehingga data laporan bisa segera mereka terima guna pertanggung jawaban. Padahal dalam penanaman mangrove, proses penanaman memiliki strategi khusus guna mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut masyarakat yakni bapak Abraham menyampaikan bahwa bibit mangrove bisa tumbuh dengan baik jika ditanam pada saat awal musim hujan. Hal ini dikarenakan suasana yang teduh akan meminimalisasi panas terik matahari yang membuat bibit mati. Namun perusahaan atau bahkan program pemerintah yang berdasarkan pada bulan pasti seperti dana program disetujui pada Bulan April dan laporan harus sudah selesai pada Bulan Agustus, misalkan. Padahal pada bulan tersebut adalah musim panas. Sering kali pihak perusahaan maupun lembaga pemerintah lebih memilih menyegerakan penanaman mangrove guna mendapatkan bukti kegiatan tanpa memperhatikan keberlangsungan mangrove.

Perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah terlihat saat program penanaman mangrove di Desa Ambulu oleh BRGM sebanyak 150.000 bibit mangrove. Masyarakat mengusulkan penanaman mangrove dilakukan di sisi sungai atau kawasan tambak hal ini agar aman dari ombak. Pihak penyelenggara menginginkan ditepi Pantai. Masyarakat mengusulkan jika ditepi pantai harus dipasang Alat Pemecah Ombak (APO) guna melindungi bibit mangrove dari ombak. Sementara alokasi APO tidak ada dalam rencana anggaran. Hal ini sangat disayangkan program gagal disebabkan dua hari kemudian bibit hilang tersapu ombak.

Melihat dari pengalaman tersebut, maka komunitas Grow Up Institute dan Kelompok tani hutan mangrove berupaya menggunakan sistem penanaman bertahap disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Hal ini bertujuan guna mendapatkan hasil maksimal yaitu pertumbuhan mangrove yang lebih di atas 20%. Proses penanaman bertahap inilah yang menjadi kegiatan yang baik oleh komunitas GUI sebab bisa mengawal proses penghitungan bibit mangrove yang dibeli oleh komunitas kepada kelompok tani hutan mangrove atau petani mangrove. Jumlah bibit dengan kapasitas besar memungkinkan terjadinya kesalahan perhitungan dan pengawasan jumlah bibit. Penanaman bibit dengan jumlah 5.000 dan dilakukan oleh lima orang anggota kelompok membutuhkan dua hari pengerjaan. Penanaman dilakukan pada pagi dan sore hari pada saat matahari tidak terlalu terik.

Proses penanaman juga diawasi oleh komunitas yang bertugas mendokumentasikan penanaman dan pertumbuhan mangrove mulai dari sebelum dan sesudah penanaman, pertumbuhan 3, 6, 9 dan 12 bulan. Proses penanaman bertahap juga dimaksudkan agar stamina masyarakat penggerak tidak kewalahan dalam menanam. Tahapan penanaman juga dapat dilakukan dengan pergantian antar anggota kelompok, atau mengajak serta masyarakat bahkan anak sekolah dari Desa Ambulu tersebut. Hal ini bertujuan agar euforia penanaman mangrove dari PT Telkom Indonesia dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Ambulu.

Konflik terjadi disebabkan minimnya pemahaman mangrove oleh pihak perusahaan. Dokumentasi yang beredar konsep penanaman mangrove biasanya dilakukan di tepi laut berhadapan langsung dengan air laut. Lemahnya transfer informasi tentang perawatan mangrove ini dimanfaatkan oleh lembaga swadaya masyarakat lain yang berasal dari Bandung yang datang ke lokasi dan observasi selama sehari dan membuat surat kepada Direksi PT Telkom Indonesia yang menyatakan bahwa penanaman mangrove di Ambulu tidak memberikan dampak kepada masyarakat serta terjadinya kecurangan bahkan manipulasi atas jumlah bibit mangrove yang terlihat dari lokasi tanam mangrove yang baru sedikit ditanami serta jumlah bibit yang terlihat berkurang sedikit dari lokasi pembibitan mangrove milik kelompok tani.

Perihal tersebut menjadikan pihak perusahaan yang mendapat tekanan berupaya melakukan investigasi serta mengkonfirmasi pada pihak Grow Up dan anggota KTH mangrove Maju Jaya Ambulu. Atas permintaan dari perusahaan proses penanaman mangrove dilakukan segera dan diselesaikan sesuai dengan jumlah bantuan yakni sisa dari 37.000 bibit yang telah tertanam. Hal ini berdampak pada perubahan sistem penanaman massal oleh kelompok dalam waktu singkat guna pelaporan program di lapangan telah selesai.

Selain itu, konsep penanaman mangrove tidak serta-merta hanya berasal dari bibit mangrove dari lahan persemaian yang berusia 3 bulan. Bibit juga bisa berasal dari *propagule* mangrove yang masih belum disemai.

“Menanam mangrove itu gampang bu, tidak harus beli bibit. Cukup pakai *propagule*. Toh disinikan punya bibitnya sendiri, tinggal kita cari saja. Banyak pohon mangrove yang berusia puluhan tahun yang menjadi sumber bibit. *Propagule* mah tinggal *cleb* (tusuk pada tanah gembur atau tanam) pasti akan tumbuh sendiri, malahan lebih bagus, sebab penyesuaian dari awal bibit. Bukan dari bibit usia 3 bulan yang proses adaptasi lagi. *Lha mundak lamun bibite sing daerah sejen artine banyue sejen, ngalie angel, dadi ake sing mati. Ari sing awit propagule mah* lebih mudah dibawa dan mudah ditanam” (Iha terlebih lagi jika bibitnya berasal dari daerah lain artinya airnya beda, proses pemindahannya susah, jadi banyak yang mati. Kalau dari *propagule* sih lebih mudah dibawa dan mudah ditanam). Permasalahan ada pada proses penanaman *propagule*. Butuh waktu dan usaha lebih sebab penanaman perlu dilakukan dengan berjalan jauh dari ujung sungai hingga muara. Terlebih jika mau menanam mangrove harus absen dari pekerjaan melaut dulu. *Paribasane sih bu, anggo bensine ka* (Ibaratnya sih, Bu, buat bensinnya itu, lho)” (wawancara Abraham, 22 Oktober 2021)

Konsep tanam *propagule* ini lebih disukai oleh anggota kelompok tani sebab mobilitas dari rumah ke lokasi tanam menjadi lebih mudah dengan memasukkan *propagule* ke karung, ketimbang bibit 3 bulan yang memerlukan armada motor tiga roda. Bahkan akses jalan yang rusak. Sedangkan dana dialokasikan guna pembelian bensin serta konsumsi kelompok bahkan menjadi uang upah penanaman. Pola ini menjadi beban bagi fasilitator untuk membuat laporan yang harus disesuaikan dengan keperluan perusahaan dengan perhitungan pembelian bibit serta perawatan dari harga per bibitnya.



**Gambar 7. Penanaman bibit *propagule* oleh Kelompok Tani Hutan Mangrove
Sumber: Dokumentasi Peneliti**

Konflik terjadi ketika masyarakat sekitar pesisir Desa Ambulu belum sepenuhnya memahami manfaat penting mangrove. Bagi masyarakat sekitar melihat mangrove sebagai tumbuhan di sekitar empang, tepi sungai, dan pinggir laut. Alih fungsi lahan pesisir sebagai tambak membuat pembukaan labah dengan cara membatat hutan mangrove terjadi di sekitar pesisir Pantai. Bahkan klaim hak milik lahan telah terjadi. Hal ini menjadi kendala bagi penggiat mangrove untuk menanam di lahan timbul pesisir laut yang seyogyanya milik negara dan dijadikan green belt. Zona hijau green belt ini berkisar 100 meter dari air pasang tertinggi air laut. Namun kenyataannya green belt ini hanya ada 10 meter. Upaya kelompok masyarakat juga terbentur karena sistem kekerabatan dan menghindari konflik sehingga pembiaran ini terus dilakukan.

“ya pribe maning ya, sedulur dewek, ya angel ya. Akhirnya isun sih prinsip sing wis ya wis, sing durung aja dilakoni. Sing dadi tambak ya wis, tapi punten sejene ka pemerintah desa atau pemerintah daerah kudu tegas iki kudune milik negara ango mangrup. Lamun ya lamun baka wis rusak embuh gab isune keder jelas nange ning masyarakat kub. (ya bagaimana ya saudara sendiri. Akhirnya saya sih berprinsip bahwa yang sudah ya sudah, yang belum jangan dilaksanakan. Yang sudah jadi tambah ya sudah, tapi tolong yang lainnnya tuh pemerintah desa atau pemerintah daerah harus tegas ini harusnya milik negara untuk mangrove. Tapi ya tapi jika sudah rusak saya tidak peduli. Saya bingung menjelaskan ke masyarakatnya tuh. (wawancara Markis, 11 Januari 2021)

Masyarakat yang semenjak dulu menjadi petani ikan di empang dan lahan empang sebagai penggembala kambing menjadikan daun mangrove jenis api-api sebagai pakan ternak. Edukasi untuk masyarakat sangat diperlukan, namun sayang program penyadaran masyarakat ini tidak dilirik oleh Perusahaan sebab dengan dalih tugas pemerintah dan akademisi. Pihak Perusahaan atau lembaga lain lebih menyukai bantuan bibit dengan jumlah bibit dikalikan satuan harga bibit yang berkisar Rp 1.500 sampai dengan Rp 2.500/batang. Untuk dana transportasi proses penanaman dan perawatan pemberi program tidak mengalokasikan. Beruntung PT Telkom memberikan biaya perawatan selama 3 tahun. Hal ini menjadi dilema bagi fasilitator dan kelompok penggerak untuk dapat mengadvokasi masyarakat sekitar untuk lebih peduli terhadap mangrove sebab tidak ada alokasi dana.

E. Kendala dan Hambatan

Kendala dan hambatan dalam upaya pengembangan mangrove dari sisi sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Aktor penggerak desa yaitu Bapak Joharudin sebagai ketua BUMDES Ambulu meninggal dunia pada bulan Agustus 2022. Kondisi ini menjadikan kepincangan dalam tubuh BUMDES. Selama ini bapak Joharudin sebagai aktor dan inisiator pengembangan objek wisata mangrove Caplok Barong. Saat ini penggantian ketua BUMDES dilakukan oleh Kepala Desa Ambulu dan menunjukkan Bapak Fauzudin Azza sebagai ketua BUMDES terpilih. Selain itu, ketua Kelompok Tani Hutan Mangrove Maju Jaya Ambulu Bapak Rifki Al-Anwary menikah dan pindah domisili sebagai warga Kabupaten Majalengka. Hal ini berimbas pada lemahnya koordinasi pengembangan penanaman mangrove. Meski yang bersangkutan masih terus aktif mengarahkan kegiatan mangrove namun minimnya intensitas menjadikan koordinasi dan kegiatan menjadi terhambat.

2. Masa pandemi Covid-19 yang menjadikan pendapatan masyarakat dari objek wisata dan bidang lainnya menurun. Dulu ketika masa sebelum pandemi kegiatan wisata yang ramai pengunjung, anggota KTH semangat untuk menanam mangrove. Kondisi ekonomi keluarga yang tercukupi membuat anggota lebih nyaman dalam berkegiatan sosial. Pada masa pandemi kegiatan objek wisata menurun dan tutup. Hal ini membuat anggota kekurangan secara ekonomi. Hadirnya PT Telkom Indonesia yang melakukan penanaman mangrove membuat mereka melihat sisi ekonomi dalam penjualan bibit mangrove dan upah kerja penanaman. Lambat laun, kesan perhitungan kerja menanam mangrove menjadi nilai ekonomi. Sisi sosial mulai kendur. Hal ini diyakini oleh Kepala Desa Ambulu yang merasakan kemunduran semangat para anggota KTH tersebut. Oleh karena itu, pihak kepala desa melakukan motivasi kepada para anggota KTH tersebut untuk kembali berkegiatan sosial tanpa pamrih.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penanaman mangrove di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon melibatkan masyarakat serta dukungan dari perusahaan baik swasta maupun BUMN dalam upaya pelestarian ekosistem mangrove melalui dana corporate social responsibility.
2. Konflik yang terjadi antara kepentingan perusahaan yang menginginkan pelaporan data secara cepat dengan batasan waktu hari kerja kalender tidak sesuai dengan program di lapangan terkait penanaman mangrove yang bergantung pada awal musim hujan yang bertujuan agar mangrove bisa bertahan lama. Minimnya pemahaman tentang proses perawatan mangrove antara perusahaan dan kelompok masyarakat di manfaatkan oleh lembaga swadaya masyarakat lain mengintimidasi perusahaan dan melaporkan bahwa program di lapangan gagal. Kecemasan perusahaan memaksa percepatan penanaman mangrove kepada masyarakat tanpa memperhatikan siklus cuaca.
3. Perbedaan perspektif antara perusahaan dan masyarakat dalam penentuan lokasi tanam mangrove. *Euforia* penanaman mangrove di pesisir laut menganggap bahwa lokasi wajib di tepi laut dan tidak yakin jika mangrove baik ditanam di Sungai atau tepi empang dalam konsep *silvofishery*. Bibit mangrove yang ditanam di pesisir laut tanpa dilengkapi APO hilang tersapu ombak.

4. Penysadaran masyarakat terutama bagi masyarakat pesisir diperlukan untuk menumbuhkan perasaan memiliki (*sense of belonging*). Sikap ini mampu menggerakkan masyarakat untuk lebih menjaga ekosistem *mangrove*.

Daftar Pustaka

- Aguw, Y. O., Setlight, M. maria magdalena, Soeikromo, D., L, R. S. D., & Gerungan, A. E. (2020). Pengelolaan Hutan *Mangrove* Terhadap Pemajuan Hak-Hak Masyarakat Adat di Sulawesi Utara. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Anggraini, P. (2018). Mitos Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan (Sebuah Kajian Kritik Lingkungan dalam Novel Sebuah Wilayah Yang Tidak Ada dalam Google Earth Karya Pandu *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan ...*, 313–323. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA/article/view/2635>
- Craswell, J.W. 2016, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trinanda, T. C. (2017). Matra pembaruan. *Jurnal Matra Pembaruan*, 1(Inovasi kebijakan), 75–84. <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/398/258>